

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MENUJU DESA SEJAHTERA
(STUDI KASUS DI KABUPATEN SRAGEN)**

**COMMUNITY EMPOWERMENT TOWARDS A PROSPEROUS VILLAGE
(CASE STUDY IN SRAGEN)**

Suyanto

Peneliti Puslitbangkesos, Kementerian Sosial RI
Jl. Dewi Sartika No. 200, Cawang III, Jakarta Timur. Telp. 021-8017146, Fax. 021-8017126
E-mail: suyantoslut@yahoo.co.id

Bambang Pudjianto

Peneliti Puslitbangkesos, Kementerian Sosial RI
Jl. Dewi Sartika No. 200, Cawang III, Jakarta Timur. Telp. 021-8017146, Fax. 021-8017126
E-mail: bambangalthaf@yahoo.co.id

Diterima: 20 Oktober 2015; Direvisi: 16 Desember 2015; Disetujui: 18 Desember 2015

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Sragen. Untuk menelaah permasalahan kebijakan menggunakan pendekatan evaluatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, studi dokumentasi dan FGD. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa pemberdayaan masyarakat berbasis paguyuban dengan pola keterpaduan berhasil dengan baik. Hal ini terbukti, melalui pemberdayaan mengelola tanaman sayuran dan perkebunan menunjukkan hasil yang memuaskan yaitu masyarakat yang dibina kebutuhan pokoknya dapat terpenuhi semakin sejahtera serta memiliki harapan ke depan. Bahkan mereka masih bisa menabung untuk keperluan pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian disarankan, untuk memaksimalkan pemberdayaan keluarga miskin, sebaiknya bisa dilakukan secara terpadu melalui pilar-pilar kesejahteraan sosial seperti pendamping lapangan dan orsos/LSM yang ada di lokasi. Bagi pemerintah dalam penanganan semua program yang menyangkut kemiskinan perlu menjaga sinergitas antar lembaga dengan pendekatan terintegrasi.

Kata Kunci: pemberdayaan, paguyuban, keluarga sejahtera.

Abstract

This research aims to know the effectiveness of community empowerment program in Kabupaten Sragen. To examine the problems of policy approach using the evaluative studies, with the techniques of data collection through interviews, observation, documentary studies and FGD. From the research, it is known that the community empowerment-based community with the integration patterns work well. This is evident, through empowerment managing vegetable crops and plantation showed satisfactory results, namely the people who nurtured their basic needs can be met more prosperous and have hope in the future. In fact, they can still save for education and health. It is strongly advised, to maximize the empowerment of poor families, should be done in an integrated manner through the pillars of social welfare as a field companion and social organizations / NGOs in the location. For the government in handling all programs related to poverty needs to maintain synergy among institutions with an integrated approach.

Keywords: empowerment, community, family welfare.

PENDAHULUAN

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pasal 1). Dengan demikian dalam Undang-Undang tersebut diakui adanya otonomi yang dimiliki Desa. Artinya desa diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari masyarakatnya sendiri, dengan demikian desa memiliki posisi sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang dalam menyelenggarakan otonomi daerah, karena dengan kuat dan mantapnya desa akan mempengaruhi secara langsung perwujudan otonomi daerah. Merujuk pada pemikiran semacam itu maka pemikiran yang menjadi landasan dalam pengaturan pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi. Dalam konteks demikian maka pengembangan otonomi asli desa memiliki landasan, visi dan misi yang kuat dalam rangka menjaga efektivitas, efisiensi dan optimalisasi otonomi daerah.

Pemerintah desa merupakan unit terdepan pelayanan kepada masyarakat serta menjadi tonggak utama untuk keberhasilan semua program. Memperkuat desa merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditunda dalam upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi desa pada khususnya dan otonomi daerah pada umumnya. Kemandirian fungsi desa dalam konteks otonomi daerah memerlukan kesiapan lembaga sosial, politik dan ekonomi desa itu sendiri. Oleh karenanya peningkatan fungsi dan kelembagaan desa memiliki arti yang strategis.

Pembangunan bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sasaran utamanya adalah “pengentasan kemiskinan”. Sumodiningrat G (1997), menyatakan kemiskinan pada dasarnya bukan saja berurusan dengan persoalan ekonomi semata, tetapi bersifat multidimensional yang dalam kenyataannya juga berurusan dengan persoalan-persoalan non-ekonomi (sosial, budaya, politik). Kartasmita (1996), menyatakan kemiskinan disebabkan: 1) rendahnya taraf pendidikan; 2) rendahnya derajat kesehatan; 3) terbatasnya lapangan kerja dan 4) kondisi keterisolasian. Selanjutnya rumah tangga miskin pada umumnya berpendidikan rendah akibatnya produktivitasnya juga rendah, sehingga penghasilannya tidak memadai dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum pangan, sandang, kesehatan dan perumahan yang diperlukan untuk dapat hidup dan bekerja.

Kebijakan Kementerian Sosial, khususnya Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, telah melakukan pembangunan sosial melalui program pemberdayaan dan pembinaan masyarakat. Pembangunan sosial sebenarnya adalah sistem totalitas pembinaan yang dirancang untuk memaksimalkan potensi dan sumberdaya masyarakat melalui bimbingan dan penyuluhan dengan mendayagunakan unsur manusia, lingkungan, ilmu pengetahuan dan teknologi, tujuannya mewujudkan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial menurut Midgley (2005) adalah suatu keadaan atau kondisi kehidupan manusia yang tercipta ketika berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik, ketika kebutuhan manusia dapat terpenuhi dan ketika kesempatan sosial dapat dimaksimalkan. Pandangan Soetomo (2010) mengenai kesejahteraan dilihat berdasarkan pandangan kultural perspektif lokal, banyak didasarkan pada pandangan kultural

masyarakat yang bersangkutan. Susetiawan (2011), menamakannya sebagai konsep kesejahteraan dalam konstruksi komunitas. Konsep kesejahteraan sangat ditentukan oleh pandangan dan visi berdasarkan kearifan lokal. Dalam masyarakat Jawa misalnya terdapat kondisi masyarakat yang ideal sebagaimana yang sering diungkapkan dalam pagelaran wayang kulit untuk mencitrakan sebuah negara yang makmur dan sejahtera. Biasanya dilafalkan dalam kata-kata “panjang punjung gemah ripah loh jinawi kerto raharjo”.

Strategi penurunan kemiskinan yang diterapkan di Kabupaten Sragen selama periode 2010-2014 adalah mengupayakan kebijakan yang terintegrasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengurangan kemiskinan dicapai melalui berbagai kebijakan alternatif yang dilaksanakan melalui empat kelompok program, yakni: 1) bantuan dan perlindungan sosial, 2) pemberdayaan masyarakat, 3) pemberdayaan usaha mikro dan kecil, 4) program pro rakyat.

Permasalahan utama di wilayah Kabupaten Sragen adalah masalah kemiskinan, terutama bagi penduduk yang tinggal di wilayah desa yang lahannya tidak subur (lahan kering) seperti wilayah utara Sungai Bengawan Solo. Di Kabupaten Sragen keluarga miskin tahun 2011 sebanyak 87.768 KK atau (308.783 Jiwa). Rinciannya keluarga sangat miskin 36.282 KK, miskin 25.745 KK dan hampir miskin 25.741 KK (Data TNP2K Sragen 2011). Sedangkan data BPS Kabupaten Sragen (PPLS-Pendataan Program Perlindungan Sosial), jumlah keluarga miskin sebanyak 115.566 KK dengan jumlah penduduk sebanyak 349.027 Jiwa. Menurut Data Menur (PPLS-TNP2K) yang ada di UPTPK Kabupaten Sragen tahun 2012 yang telah diverifikasi ada perbedaan antara data PPLS dengan data yang dikeluarkan TNP2K yakni, 27.803 KK dengan jumlah warga miskin 40.244

jiwa. Sedangkan menurut data BPS Kabupaten Sragen tahun 2013 Jumlah Penduduk 891.832 jiwa (Laki-Laki: 441.672 jiwa dan Perempuan: 450.160 jiwa) dengan 276.919 KK). Artinya penduduk miskin di Sragen tahun 2013 masih (39,14%) dari total penduduk Sragen atau masih 31,69%). Dengan demikian kemiskinan di Kabupaten Sragen secara prosentase masih dua kali lipat kemiskinan nasional.

Kabupaten Sragen telah melaksanakan program penanggulangan kemiskinan melalui program Kawasan Ramah Pelestarian Lingkungan (KRPL) lokasinya di semua desa, namun yang dinilai paling berhasil ada di Desa Bendo. Dengan adanya otonomi daerah atau pola dekonsentrasi, program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Kementerian/ lembaga mulai diarahkan ke pendampingan. Dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 mengenai PNPM-Mandiri pemerintah Kabupaten Sragen mulai merancang pelaksanaan program dan pendanaan PNPM Mandiri dengan cara melakukan pemetaan permasalahan sosial, potensi SDA dan SDM di seluruh desa.

Tahun 2011 melaksanakan pendataan keluarga miskin yang dikenal dengan data PPLS-2011, data tersebut sebagai data terpadu yang harus dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di semua kementerian/ lembaga. Selain melaksanakan pendataan juga dimulainya pelaksanaan program PNPM-Mandiri di semua wilayah kabupaten/kota. Tahun 2012 Kabupaten Sragen masih melaksanakan program penanggulangan kemiskinan melalui program PNPM-Mandiri yang dilakukan TNP2K walaupun sudah ada Peraturan Bupati mengenai Unit Pelayanan Terpadu Peanggulangan Kemiskinan (UPTPK). Hal ini disebabkan UPTPK yang terbentuk belum mulai bekerja, maka implementasi program penanggulangan kemiskinan di

Kabupaten Sragen masih dilakukan secara sektoral, belum terkoordinasi. Program penanggulangan kemiskinan bisa dilakukan secara terkoordinasi dimulai tahun 2013 dimulai dengan verifikasi Data TNP2K Sragen (data program perlindungan sosial) dan data PPLS tahun 2011 (BPS Kabupaten Sragen 2011). Dengan adanya UPTPK dan adanya program Kawasan Ramah Pelestarian Lingkungan KRPL di desa-desa yang ada pada wilayah Kabupaten Sragen yang pelaksanaannya dimulai tahun 2011 dengan dana PNPM-mandiri per desa mendapatkan dana sebesar Rp.30.000.000,- yang digunakan untuk usaha masyarakat pedesaan. Dari dana bantuan tersebut di Desa Bendo digunakan untuk usaha tani dan budidaya papaya kalifornia. Dari hasil evaluasi ternyata memiliki kemajuan yang paling pesat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, lebih menekankan pada proses dari pada produk, analisis data secara induktif dan lebih menekankan makna (Sugiyono, 2010). Menurut Sugiyono pada penelitian kualitatif, uji keabsahan data meliputi uji validitas internal, validitas eksternal, reliabilitas dan obyektivitas. Informan dalam penelitian sebanyak 60 responden, pengumpulan data melalui wawancara, observasi, studi dokumentasi dan FGD. Analisis data menggunakan pendekatan studi evaluatif. Untuk menelaah permasalahan kebijakan, digunakan Logical Framework Analysis seperti yang digunakan oleh Shortell dan Richardson (Shortell dan Richardson, 1978). Pendekatan studinya adalah evaluatif, menggunakan pendekatan *system and model for delineating program elements in the evaluation process* yang meliputi: kondisi awal, masukan (*inputs*), proses, keluaran (*outputs*), manfaat (*outcomes*) dan dampak (*impacts*), dan teknik penilaian dilakukan secara *rapid appraisal methods*.

HASIL PENELITIAN

Profil Kabupaten Sragen.

Kabupaten Sragen telah ada sebelum Indonesia merdeka, tepatnya pada hari Selasa Pon, tanggal 27 Mei 1746. Setelah Proklamasi tahun 1945 di Sragen ada gerakan masyarakat yang ingin melepaskan diri dari kekuasaan Kasunanan Surakarta, bergabung dengan Pemerintah Republik Indonesia. Keinginan masyarakat disalurkan lewat Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID). Namun Bupati tidak bersedia memenuhi permintaan KNID Sragen dengan alasan: sebagai Abdi Dalem beliau harus tetap setia kepada raja, sikap melepaskan diri bertentangan dengan Keputusan Pemerintah Kerajaan, maka sebagai jalan tengah Bupati lebih baik menyingkir ke Solo, dan untuk mengisi kekosongan Bupati dibentuklah Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen yang mengusulkan KMRT P Mangunnagoro sebagai Bupati Sragen. Untuk menyatakan lepas dari ikatan Swapradja diadakan Rapat Umum di Halaman gedung kontrolir (Kantor Pemda sekarang) yang dihadiri oleh masa rakyat, organisasi perjuangan dan Lurah Desa se Kabupaten Sragen pada tanggal 26 April 1946. Mulai tahun 1946 Kabupaten Sragen menjadi wilayah Kabupaten tersendiri. (Sumber: Surat Edaran Bupati).

Luas wilayah Kabupaten Sragen 94.155 Ha, Luas Sawah: 40.129 Ha, dan Tanah Kering: 54.026 Ha. Jumlah Penduduk tahun 2013: 891.832 jiwa (Laki-Laki: 441.672 jiwa dan Perempuan: 450.160 jiwa) dengan KK: 276.919 KK), Mata Pencaharian Petani 55%, Pegawai/Pengusaha 15%; dan Lain-lain 30%. Potensi pertanian Lahan Basah/Kering, Perdagangan, Industri, Pariwisata (situs purbakala Sangiran). Industri Sarung Goyor dan Batik Tulis. Keadaan Topografi Kabupaten Sragen dibagi dua wilayah, Sebelah Utara terdiri dari: 11 Kecamatan,

116 Desa, 4 Kelurahan; dan Sebelah Selatan: 9 Kecamatan, 80 Desa, 8 Kelurahan. Wilayahnya terbelah menjadi dua wilayah yaitu; sebelah Utara Bengawan Solo dan Selatan Bengawan Solo. Batas wilayah sebelah Utara dengan Kabupaten Grobogan; Selatan dengan Kabupaten Karanganyar; Barat dengan Kabupaten Boyolali; Timur dengan Kabupaten Ngawi, Jatim (BPS. Kabupaten Sragen Dalam Angka, 2014).

Lokasi penelitian diadakan di Kecamatan Sukodono, tepatnya di Desa Bendo. Jika ingin ke Kantor Kecamatan Sukodono, dari Ibukota Kabupaten Sragen ke Kota Kecamatan Sukodono berjarak 20 km dengan kondisi jalan cukup baik bisa dilalui kendaraan mobil/motor dengan waktu tempuh 30 menit. Jika dari Kota Solo jaraknya 50 km dengan waktu tempuh 1 jam (BPS. Kecamatan Sukodono Dalam Angka, tahun 2014). Topografi Kecamatan Sukodono: Luas Wilayah 4.555,31 Ha terdiri 9 desa, berpenduduk 32.762 jiwa (16.078 laki-laki dan 16.684 perempuan), jumlah rumah tangga 9.866. Pemanfaatan lahan paling banyak pekarangan, Tegal/kebun 27%, sawah tadah hujan 24%, irigasi 14% dan lainnya 10%.

Dari sembilan desa tersebut, Desa Bendo merupakan lokasi uji petik penelitian pemberdayaan masyarakat melalui program Kawasan Ramah Pelestarian Lingkungan (KRPL) dengan pendekatan kelompok (Paguyuban). Desa Bendo memiliki profil Luas wilayah Desa Bendo 201,36 Ha, dengan jumlah penduduk 4.441 jiwa (2.214 laki-laki dan 2.227 perempuan) dengan jumlah 1.402 Kepala Keluarga. Pencarian penduduk Desa Bendo bertani. Keadaan Topografi Desa Bendo terletak di sebelah utara Bengawan Solo dengan kondisi lahan kering tandus. Maka penduduknya sebagian besar dapat dikatakan miskin (Monografi Desa Bendo, 2014).

Di Kabupaten Sragen program penanggulangan kemiskinan melalui lembaga koordinasi Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimulai tahun 2013 sesuai dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor: 17 Tahun 2013. Lembaga koordinasi tersebut bernama lembaga Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK). UPTPK terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sragen Nomor 2 tahun 2012. Peraturan Bupati Sragen Nomor: 17 Tahun 2013, sama dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor: 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan UPTPK Kabupaten Sragen berisi perubahan struktur Organisasi UPTPK, namun tahun 2013 UPTPK baru mulai bekerja. UPTPK merupakan lembaga koordinasi yang memiliki karyawan yang diambil dari organisasi gabungan dari berbagai satker (SKPD) yang ada di Sragen. Oleh karena itu Sumber Daya Manusia di UPTPK terdiri dari berbagai perwakilan dari SKPD (Dinsos, Bappeda, Dinkes+RSUD, Diknas, Dinas PU, Disparbutpor, Dinas Perdagangan, Diklat dan Litbang, Bagian Kesra, BKPBMD, Bapeluh, Disnaker dan Transmigrasi, Dinas Peternakan dan Dinas Perikanan, Dispartan, BUMN, BUMD dan Swasta).

Kedudukan UPTPK sebagai lembaga koordinator pelaksanaan program di tingkat Kabupaten, artinya semua program yang dilakukan SKPD yang ada di Kabupaten Sragen yang menyangkut program penanggulangan kemiskinan dalam mengimplementasikan program ke masyarakat harus mendapat rekomendasi dari UPTPK terlebih dahulu, baik program yang dibiayai APBD, APBN dan CSR.

Tujuan dibentuknya UPTPK agar UPTPK berperan sebagai lembaga koordinasi antar lembaga (SKPD/lembaga) yang ada di Kabupaten Sragen terutama bagi SKPD yang ada dalam TNP2K pada program penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian UPTPK

merupakan lembaga koordinator pelaksanaan PNPM-Mandiri. Tujuan PNPM-Mandiri, adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan meningkatkan kesempatan kerja yang dilakukan secara terkoordinasi dengan berbagai cara seperti: meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil, dan kelompok masyarakat lainnya yang belum dilibatkan secara optimal dalam proses pembangunan, meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif, dan akuntabel, meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program, dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin, meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah dan kelompok peduli (swasta, asosiasi, perguruan tinggi, media, LSM, dan lain-lain) untuk lebih mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan, meningkatnya keberdayaan dan kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah serta kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.

Sasaran program penanggulangan kemiskinan melalui program pemberdayaan masyarakat adalah penjabaran dari program PNPM-Mandiri yang dilakukan TNP2K. Sasaran utama dari kedua program tersebut adalah kelompok masyarakat miskin di perdesaan dan perkotaan, kelompok penganggur dan pencari kerja di perdesaan dan perkotaan, kelembagaan masyarakat di perdesaan dan perkotaan, serta kelembagaan pemerintah lokal.

Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Sragen

Dalam implementasi program penanggulangan kemiskinan Pemerintah Kabupaten Sragen telah mengikuti, melaksanakan (strategi, kebijakan,

program dan kegiatan) penanggulangan kemiskinan yang telah ditetapkan pemerintah pusat, walaupun pelaksanaannya masih dilakukan masing-masing SKPD secara sektoral dan kegiatan penanggulangan kemiskinannya juga dilakukan dalam bentuk: 1) penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga; 2) penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat; dan 3) penanggulangan kemiskinan berbasis usaha ekonomi mikro dan kecil, dengan dana anggaran APBD (Kabupaten dan Propinsi) dan APBN.

Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan melalui program KRPL lokasinya di semua desa pada wilayah Kabupaten Sragen, program KRPL yang dianggap paling berhasil ternyata program di Desa Bendo. Hasil pelaksanaan program KRPL dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat secara terpadu ini ternyata memberikan hasil yang lebih efektif dan tingkat keberlanjutannya lebih baik. Mengingat ada bermacam-macam tingkat sosial ekonomi masyarakat yang perlu ditingkatkan, maka setiap tingkatan kemiskinan tersebut harus ditangani dengan solusi yang berbeda dan tepat sasaran.

Di Kabupaten Sragen tahun 2012 implementasi program penanggulangan kemiskinan masih dilakukan secara sektoral, belum terkoordinasi dengan benar walaupun PNPM-Mandiri sudah diluncurkan Presiden sejak tahun 2007 dan Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK) sudah mulai dibentuk. Namun implementasi PNPM-Mandiri di Kabupaten Sragen masih dilakukan secara sektoral belum terkoordinasi. Program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sragen dilakukan secara terkoordinasi baru dimulai tahun 2013. Dimulai dengan pemetaan dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan melalui program Kawasan Ramah Pelestarian Lingkungan (KRPL).

KRPL adalah program Pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan Paguyuban di desa-desa dengan pola pendampingan oleh SKPD/lembaga sosial yang ada di wilayah Sragen. KRPL dapat dikatakan sama dengan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), yang membedakan adalah jumlah anggota dan pelaksanaan pedampingan/pembinaan. Pemberdayaan masyarakat melalui KUBE yang dilakukan Kementerian Sosial, pendampingan dilakukan pada proses pelatihan atau pembekalan sebelum program peningkatan ekonomi dilaksanakan dengan pendamping dari Dinas Sosial. Sedangkan program KRPL pendampingan dilakukan secara berkelanjutan dari proses pelatihan sampai pelaksanaan kegiatan usaha hingga masyarakat yang dibina benar-benar berdaya dan mampu menghidupi keluarganya, dengan pendamping dilakukan oleh satker (SKPD) sesuai dengan ketrampilan yang diberikan kepada kelompok masyarakat desa (paguyuban) pada waktu proses pelatihan/pembekalan. Pendamping lapangan dalam program KRPL berasal dari Dinas Sosial, SKPD/ lembaga sesuai kerampilan yang diberikan bisa dari Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Peternakan, Bapeluh dan CSR.

PEMBAHASAN

Program penanggulangan fakir miskin (PPFM) yang dilaksanakan Departemen Sosial merupakan program pemberdayaan masyarakat yang menggunakan pendekatan kelompok KUBE, namun implementasinya dilakukan secara sektoral. Setiap kelompok KUBE diberi bantuan pelatihan keterampilan, bantuan modal atau bahan dan peralatan kerja. KUBE tersebut beranggotakan antara 5-10 orang, dan diantaranya 3 orang dijadikan sebagai pengurus (Ketua, Sekretaris dan Bendahara). Sedangkan program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan TNP2K juga menggunakan pendekatan pemberdayaan

dengan cara memberdayakan masyarakat desa, untuk mewujudkan kemandirian masyarakat desa melalui membangun kemitraan dengan pemerintah daerah dan CSR (kelompok peduli masyarakat). Implementasinya program dengan cara keterpaduan program antar SKPD/CSR yang ada di wilayah kabupaten dan mensinergikan pendekatan pembangunan sektoral (antar SKPD), pembangunan kewilayahan di kelompok sasaran, dan pembangunan partisipatif.

Di Kabupaten Sragen Pemberdayaan Sosial melalui kelompok KUBE masih dilakukan secara sektoral, walaupun Kementerian Sosial sejak tahun 1997 telah menetapkan Program Menghapus Kemiskinan (MPMK) bersifat koordinatif lintas sektor. Sedangkan pemberdayaan sosial melalui pelayanan terpadu untuk penanggulangan kemiskinan awalnya adalah program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan KPK (Pemerintah Pusat) atau KNP2K (Pemerintah daerah), sebelum ada UTPK. Sebab sasaran dan tujuan dibentuknya lembaga KPK (Pemerintah Pusat) atau KNP2K (Pemerintah daerah), UTPK sama, yakni: pembinaan masyarakat dengan mendayagunakan sumber dan potensi masyarakat yang ada di wilayah Desa dalam mencapai kesejahteraannya dengan program KRPL. Implementasi antara program KUBE dengan KRPL ada perbedaan, terutama dalam pendampingan. Kalau Program Kementerian Sosial (KUBE) implementasi di lapangan hanya didampingi dan didanai oleh satu lembaga yang bersumber dari Kementerian Sosial dengan pendamping lapangan TKSK Dinas Sosial dengan sumber dana dari Kementerian Sosial. Sementara itu program KRPL didampingi dan dibiayai secara terkoordinasi dari berbagai instansi/SKPD/lembaga, selain dari Dinas Sosial (TKSK) sebagai pendamping lapangan. Sumber dana program KRPL bersumber

dari program PNPM-Mandiri, juga berasal dari instansi/SKPD/lembaga yang ada di pemerintah daerah, lembaga (SKPD) tersebut selain memberikan bantuan dana juga sebagai pendamping atau tenaga teknis lapangan yang sesuai dengan bidang keahliannya dan dilakukan secara terkoordinasi di bawah Badan Penyuluh Kabupaten Sragen.

Dalam melakukan proses perubahan PNPM-Mandiri melalui BKM/LKM/Paguyuban kesejahteraan masyarakat tidak bisa bekerja sendiri, karena permasalahan kemiskinan yang dihadapi begitu kompleks. Diperlukan sumber daya, baik itu sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber dana dari pihak lain dalam menjalankan programnya. Oleh karena itu LKM/Pakesra harus bertindak sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah dan sektor swasta dengan cara menggalang kerjasama dengan berbagai pihak, baik itu pemerintah maupun swasta (perguruan tinggi, pengusaha, LSM). Artinya LKM harus mampu mendorong kepedulian berbagai pihak untuk mendukung gagasan perubahan sosial dalam penanggulangan kemiskinan.

Strategi dasar PNPM-Mandiri ada dua, yakni: Pertama, menerapkan pendekatan pemberdayaan untuk mewujudkan kemandirian masyarakat dan membangun kemitraan dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat. Kedua, menerapkan keterpaduan dan sinergi pendekatan pembangunan sektoral, pembangunan kewilayahan, dan pembangunan partisipatif. Sementara itu, strategi operasionalnya dilakukan dengan cara: 1) mengoptimalkan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki masyarakat, pemerintah daerah, serta kelompok peduli lainnya (swasta, asosiasi, perguruan tinggi dan LSM) secara sinergis; 2) menguatkan peran pemerintah kota/kabupaten sebagai pengelola program-program penanggulangan kemiskinan di wilayahnya;

3) mengembangkan kelembagaan masyarakat yang dipercaya, mengakar, dan akuntabel; 4) mengoptimalkan peran sektor dalam penyediaan pelayanan dan kegiatan pembangunan secara terpadu di tingkat komunitas; 5) meningkatkan kemampuan pembelajaran di masyarakat dalam memahami kebutuhan dan potensinya serta memecahkan berbagai masalah yang dihadapi; 6) menerapkan konsep pembangunan partisipatif secara konsisten dan dinamis. Fakta menunjukkan, dalam implementasi program penanggulangan kemiskinan pemerintah Kabupaten Sragen mengikuti kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang telah ada walaupun masih dilaksanakan secara sektoral oleh masing-masing SKPD Kabupaten.

Program kegiatan penanggulangan kemiskinan di Desa Bendo dimulai dengan verifikasi data PPLS tahun 2011. Kemudian hasil verifikasi data direkomendasikan kepada seluruh SKPD yang berkepentingan untuk ditindaklanjuti sesuai program yang telah ditetapkan pemerintah. Di wilayah Kabupaten Sragen diimplementasikan kedalam tiga kegiatan, yaitu: pertama: penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga; kedua: penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat; dan ketiga: penanggulangan kemiskinan berbasis usaha ekonomi mikro dan kecil. Program ini didanai anggaran APBD Kabupaten Sragen, APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBN. Di Kabupaten Sragen program penanggulangan kemiskinan ini dikenal dengan program Kawasan Ramah Pelestarian Lingkungan (KRPL) yang berlokasi di semua desa pada wilayah Kabupaten Sragen. Program KRPL di Desa Bendo mulai tampak hasilnya, setelah usaha pertanian (sayuran dan perkebunan buah pepaya kalifornia awal tahun 2012 bisa memasarkan ke lain desa, bahkan bisa sampai ke tingkat provinsi Jawa Tengah. Dari

hasil evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan (program KRPL) di Kabupaten Sragen ternyata: program penanggulangan kemiskinan yang bertumpu pada pendekatan pemberdayaan masyarakat secara terpadu memberikan hasil yang lebih efektif dari pada secara sektoral dan tingkat keberlanjutannya jauh lebih baik.

Program penanggulangan kemiskinan yang bertumpu pada pendekatan pemberdayaan masyarakat secara terpadu di Desa Bendo dalam pelaksanaannya menggunakan pendekatan kelompok paguyuban sebagai kelompok usaha bersama untuk Usaha Ekonomi Produktif (UEP), dengan bantuan yang diberikan dalam bentuk, pendampingan usaha, termasuk pelatihan keterampilan usaha, bantuan modal awal atau bahan untuk usaha dan peralatan kerja. Implementasi program, setiap kelompok beranggotakan antara lebih 10 orang yaitu 3 orang dijadikan pengurus kelompok terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Kelompok Usaha Bersama yang menggunakan pendekatan kelompok paguyuban merupakan bentuk intervensi pemerintah yang bertujuan untuk memecahkan masalah masyarakat yang tergolong miskin di pedesaan pada wilayah Kabupaten Sragen yang perlu ditingkatkan ekonominya.

Di Desa Bendo kegiatan peningkatan ekonomi ini merupakan program kegiatan berupa pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi melalui Paguyuban Kesejahteraan Rakyat (Pakesra). Pakesra merupakan LKM yang dikelola kaum perempuan dengan kegiatan simpan pinjam untuk membantu masyarakat dalam membangun ekonomi keluarga yang bergerak di bidang pertanian, perikanan dan peternakan. Pakesra merupakan Kelompok Wanita Tani (KWT) sebagai unit usaha, Pakesra ini beranggotakan 60 keluarga yang terdiri dari kaum perempuan yang berdomisili di Desa

Bendo. Kelompok ini resminya terbentuk tahun 2012 sebagai pelaksanaan syarat untuk mendapatkan dana yang bersumber dari Program PNPM-Mandiri. Dengan Berdirinya Pakesra dan adanya pembinaan dari para pendamping lapangan yang dilakukan dari berbagai instansi (SKPD) yang ada di Kabupaten Sragen ternyata kegiatan melalui Pakesra telah dapat mendorong kemandirian ekonomi warga Desa Bendo.

Proses Pembinaan Pakesra Hingga tahun 2014

Kegiatan Pakesra hingga akhir tahun 2014 di Wilayah Kecamatan Sukodono hingga saat ini telah dikembangkan ke desa lain dan telah terbentuk 4 Kelompok Pakesra. Setiap kelompok beranggotakan 10-22 orang. Tahapan terbentuknya Pakesra di wilayah Kecamatan Sukodono secara garis besarnya, ada tiga tahapan, yakni: tahap persiapan; tahap perbaikan lingkungan; dan tahap terminasi.

1. Tahap Persiapan melakukan transformasi sosial yang ditentukan berdasarkan kebutuhan dan kepentingan warga, selain kegiatan orientasi dan pemetaan sosial atau verifikasi data yang telah ada (data PPLS tahun 2011). Dalam tahap persiapan ini tujuannya mengetahui profil masyarakat desa berikut lingkungan sosialnya, sebagai bahan bagi petugas memberikan motivasi dan studi kelayakan sosial budaya dalam merumuskan program aksi, dengan pertimbangan skala prioritas, diperkuat rekomendasi, termasuk pemantapan persiapan perbaikan pemukiman sosial, pemantapan kegiatan di masyarakat/kegiatan penyusunan rencana program pemberdayaan ekonomi.
2. Tahap Perbaikan Lingkungan. Tahap implementasi pemberdayaan ekonomi pada warga desa, termasuk pemberian fasilitas-fasilitas sesuai kebutuhan dan kondisi warga, seperti pemberian fasilitas pengembangan ekonomi (usaha pertanian, peternakan dan

sembako). Dalam tahap ini disertai dengan bimbingan sosial dan pembinaan usaha yang melibatkan instansi terkait, dengan harapan secara bertahap warga dapat meningkatkan taraf kesejahteraan.

3. Tahap Terminasi. Tahap ini merupakan proses akhir pembinaan warga desa, dilihat dari dampak program pemberdayaan yang menunjukkan kegiatan pemberdayaan berjalan dengan baik, sesuai harapan pemerintah dan secara bertahap terjadi peningkatan ekonomi warga terutama mereka dapat memenuhi kebutuhan pokoknya minimal (kebutuhan pangan, sandang dan perumahan) sebagai dampak pembinaan dari pemerintah.

Tenaga Pelaksana

Tenaga Pelaksana adalah semua pihak yang ditunjuk atau ditetapkan mengikuti proses pelayanan melalui program kesejahteraan sosial yang sudah ditetapkan Bupati Sragen. Keberadaan tenaga pelaksana dalam upaya mencapai tujuan atau menjamin efektivitas program, menjadi unsur terpenting. Indikator yang digunakan di dalam menentukan kualitas tenaga pelaksana adalah faktor pendidikan. Dari hasil penelitian diperoleh gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan peningkatan kesejahteraan sosial di Kabupaten Sragen tidak hanya dilakukan Dinas Sosial saja, namun sudah dilakukan secara terpadu baik itu dilihat dari sumber dana, maupun tenaga pelaksananya. Tenaga-tenaga pelaksana dalam program pengentasan kemiskinan adalah karyawan yang berasal dari satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) dan Lembaga UPTPK sebagai lembaga koordinasi implementasi program di Kabupaten Sragen. Semua program SKPD yang ada di Kabupaten Sragen yang akan diimplementasikan di masyarakat harus mendapatkan rekomendasi dari lembaga UPTPK yang telah ada, misalnya: Diknas/Depag (Sintawati), Bagian Kesra (basiswa mahasiswa

di Pulau Jawa), Badan Diklat (Diklat/kursus bagi warga miskin), Dinas Sosial (Rusilawati/RTLH, PKH dan sangduta), BKPM (pelayanan KB, PNPM-Mandiri), Disnakertrans (Shelter Pekerja Anak), DKK (Jamkesmas/Jamkesda), Bapeluh (KRPL dan Pakesra), Pertanian, Peternakan, Dinas Ketahanan Pangan, Baz/Laz (Sumbangan Kebangsaan Muslim), CFCD (CSR Perusahaan/BUMD), Matra (Sumbangan Kebangsaan Pejabat).

Dengan adanya rekomendasi dari UPTPK, SKPD yang bersangkutan bisa melakukan kegiatannya sesuai dengan program yang ada dan berkoordinasi dengan Badan Penyuluh Kabupaten Sragen. Badan Penyuluh ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program SKPD, misalnya Pelaksanaan program kesejahteraan sosial dilakukan oleh petugas sosial dari Dinas Sosial yang ada di kecamatan dan bertanggung jawab membina program dan sebagai pengawas pelaksana teknis program yang dilaksanakan SKPD. Di bidang ekonomi dilaksanakan oleh instansi terkait atau SKPD yang menangani ekonomi, yang merupakan tenaga-tenaga di bidang ekonomi yang memiliki program pemberdayaan. Dengan susunan organisasi yang demikian pelaksanaan program kesejahteraan sosial melalui pendekatan Pakesra dapat berjalan dan mempunyai hasil yang diharapkan, karena tenaga-tenaga dalam pelaksanaan program kesejahteraan sosial sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Proses Pembentukan Paguyuban Kesejahteraan Rakyat

Dilihat dari proses pembentukan Paguyuban Kesejahteraan Rakyat (Pakesra), menurut informasi yang di peroleh dari pengurus, bahwa pembentukan Pakesra melalui: 1) pendataan oleh Pekerja Sosial Kecamatan dan aparat desa; 2) verifikasi data oleh aparat Kecamatan dan UPTPK Kabupaten; 3) bimbingan sosial dan

latihan ketrampilan oleh Instansi (SKPD yang memiliki program dan Bapeluh Kabupaten Sragen).

Dalam pelaksanaan bimbingan sosial dan latihan keterampilan yang paling diutamakan adalah latihan ketrampilan dalam proses perbaikan lingkungan maka dari itu pendampingan di ambil/dari tenaga yang berasal dari SKPD Dinas (Pertanian, Peternakan, Perikanan) dan Bapeluh Kabupaten Sragen. Jenis latihan keterampilan yang diberikan: pertanian buah-buahan dan sayuran dengan memanfaatkan lahan pekarangan yang tidak difungsikan, pemeliharaan ikan dan penangkarannya serta pemeliharaan entok. Semua kegiatan latihan keterampilan tersebut dilakukan bekerjasama dengan instansi Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sragen.

Struktur dan Dinamika Paguyuban Kesejahteraan Rakyat

Sasaran penelitian di Desa Bendo ini merupakan Program Lintas Sektor yang ada di Kabupaten Sragen dengan dana yang bersumber APBD, APBN dan LSM (CSR). Program yang dikucurkan pada awalnya adalah program peningkatan ekonomi pertanian, budidaya ikan dan pemeliharaan ternak (kambing dan entok) yang dimulai dari tahun 2011.

Pembentukan Pakesra dimulai melalui pembentukan kelompok dengan struktur organisasi yang anggotanya terdiri dari ibu-ibu rumah tangga yang ada dalam satu wilayah Rukun Tetangga (RT) baik ibu warga dari keluarga mampu dan tidak mampu/miskin, kemudian dibentuk kepengurusan (Ketua, Sekretaris dan Bendahara). Dalam perkembangan perjalanannya Pakesra yang telah terbentuk mengalami perubahan, khususnya jumlah anggota Pakesra dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang semula hanya

pertanian (budidaya buah papaya) dan pertanian sayuran, kemudian meningkat bertambah dengan usaha perikanan dan peternakan (entok dan kambing). Bahkan mulai tahun 2013 pemerintah Kabupaten telah mengembangkan pembentukan Pakesra ke Desa lain. Pakesra mulai tahun 2013 dikembangkan dengan cara setiap wilayah Rukun Tetangga yang ada di Kabupaten Sragen dibentuk Pakesra dengan sasaran khusus bagi warga miskin.

Analisis Keberhasilan

Kurun waktu evaluasi keberhasilan pelaksanaan program Bantuan Kesejahteraan Sosial melalui pendekatan Pakesra, adalah mulai dari awal pelaksanaan program sampai tahun 2014. Untuk mengetahui hasil pemberdayaan masyarakat melalui program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sragen, indikator yang dijadikan tolok ukur tingkat keberhasilan Pakesra didasari pada 4 tolok ukur: 1) kemampuan berusaha anggota Pakesra; 2) peningkatan pendapatan anggota Pakesra; 3) pengembangan usaha; 4) peningkatan kepedulian dan kesetiakawanan sosial antara anggota Pakesra dengan masyarakat sekitar.

Dari masing-masing pertanyaan yang menyangkut 4 tolok ukur tersebut diberi score atau nilai. Menurut Agung (1992) dan Sugiyono (2010) "nilai 1 (satu) untuk jawaban yang benar dan jawaban nilai 0 (nol) untuk jawaban yang dinilai salah. Selanjutnya jawaban yang sudah dinilai hasilnya diolah dengan cara dimasukkan dalam tabel pengolahan data yang telah kita siapkan. Dari hasil pengolahan data, dengan menggunakan perhitungan Reproduksiabilitas, Reproduksiabilitas pertanyaan ke- i (R_i) dan reproduksiabilitas total (R_t).

Tingkat keberhasilan program melalui pendekatan Pakesra, jika hasilnya menunjukkan angka di bawah 90%, maka program dikatakan gagal, dan jika angka di atas 90% program

dikatakan berhasil. Hal ini sesuai dengan skala yang dipakai oleh Guttman sebagai batas minimal untuk skala sempurna (*perfect scale*). Menurut White dan Salz mendefinisikan statistik R_i , dengan rumus $R_i = 1 - E_i/N$ dimana E_i = Jumlah kesalahan untuk pertanyaan ke i dan N = Jumlah subyek atau responden untuk menghitung R_i pada pertanyaan ke i . Untuk menghitung reproduksibilitas total (R_t) White dan Salz memakai rumus statistik $R_t = 1 - [\sum(E_i) \sum(NK)]$ dimana $\sum(E_i)$ merupakan jumlah seluruh penyimpangan/kesalahan dari rangkaian yang telah ditetapkan untuk seluruh pertanyaan (item), N menyatakan banyaknya responden dan K menyatakan banyaknya pertanyaan (item) dalam instrumen.

Hasil analisa data evaluasi ternyata dari empat kriteria (kemampuan berusaha, peningkatan pendapatan, pengembangan usaha dan peningkatan kepedulian kesetiakawanan sosial), diperoleh angka di atas 0,90. Dengan angka tersebut maka program Pakesra melalui pendekatan paguyuban dinilai berhasil dengan baik atau *output* telah sesuai dengan tujuan program pemberdayaan, karena program tersebut memiliki dampak yang positif dipastikan ada keberlanjutannya. Sebab jika menghasilkan angka kurang atau di bawah 0,90 program Pakesra dinilai gagal atau tidak sesuai dengan yang diharapkan. Guttman (Maranell, 1974) telah memberi batas minimal untuk skala sempurna (*perfect scales*) adalah 90 dari hasil pengujian. Selanjutnya keberhasilan masing-masing tolok ukur dengan rumus $R_t = 1 - [\sum(E_i)]/(NK)$. Hasil *output* dimaksud dalam peningkatan pemenuhan kebutuhan keluarga terutama dalam kebutuhan makan tidak perlu lagi harus mengeluarkan uang untuk membeli bahan kebutuhan pokok lagi karena dari hasil usaha budidaya tanaman sayuran sudah cukup, bahkan anggota Pakesra bisa menjual hasil kepada masyarakat desa lain yang uangnya

bisa ditabung. Dengan demikian selain hasil kerja pokok dan kegiatan mengikuti program Pakesra mereka bisa ditabung, juga bisa untuk pemenuhan kebutuhan lainnya, seperti kesehatan dan pendidikan.

KESIMPULAN

Penelitian ini bersifat evaluatif, fokus penelitiannya adalah salah satu evaluasi program pemberdayaan keluarga miskin di Kabupaten Sragen melalui pendekatan Paguyuban. Hasil yang berkaitan dengan efektivitas program merupakan elemen hubungan sebab akibat. Diketahui dari hasil analisa warga masyarakat Desa Bendo yang berjumlah 60 Kepala Keluarga telah mendapatkan bantuan dan pembinaan dari berbagai instansi (SKPD/Lembaga). Bantuan tersebut berupa pemberian bantuan modal usaha, pembinaan ketrampilan. Bantuan tersebut berasal dari dana APBD (Kabupaten atau Propinsi) dan APBN.

Hasil evaluasi ternyata dari empat kriteria (kemampuan berusaha, peningkatan pendapatan, pengembangan usaha dan peningkatan kepedulian kesetiakawanan sosial), menunjukkan diperoleh hasil yang menggembirakan, karena dari hasil analisa data diperoleh angka 0,90 ke atas. Dengan angka tersebut maka program Pakesra melalui pendekatan paguyuban dinilai berhasil dengan baik atau *output* telah sesuai dengan tujuan program pemberdayaan, karena jika kurang atau di bawah 0,90 program Pakesra dinilai gagal atau tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Dilihat dari sumber daya manusia, secara makro, pelaksanaan pemberdayaan program KRPL penanggulangan kemiskinan, pelaksanaannya menggunakan konsep tribina, yakni: bina lingkungan, bina manusia dan bina sosial-ekonomi. Kegiatannya dilaksanakan dengan tiga tahapan kegiatan: 1) kegiatan persiapan dimulai dari pemetaan dan

penjajagan, 2) pelaksanaan pemberdayaan dimulai dengan kegiatan pemberian pelatihan, pemberian bantuan modal usaha dan pelaksanaan pendampingan kegiatan ekonomi dan 3) terminasi.

SARAN

Warga miskin memiliki masalah yang sangat kompleks, baik dari sisi geografis, sosiologis maupun ekonomis. Dari sisi geografis, warga miskin memiliki keterbatasan akses untuk menjangkau berbagai fasilitas untuk pengembangan potensi diri maupun sosial. Lokasi keberadaan warga berada di daerah jauh dari akses, karena sarana jalan dan transportasi angkutan menjadi masalah yang sangat dibutuhkan untuk menjangkau komunitas luar. Dari sisi sosiologis, warga lebih banyak bergaul pada lingkungan terbatas. Dari sisi ekonomi, untuk menjangkau pasar harus dengan jalan kaki yang jaraknya cukup jauh, untuk memasarkan hasil pertanian mereka kesulitan karena pasar lokasinya jauh. Masalah pemasaran hasil bumi yaitu tidak adanya pasar di Desa Bendo.

Berdasarkan kompleksitas masalah, baik aspek geografis, sosiologis serta ekonomis, selayaknya dibangun sarana pasar tradisional dan prasarana transportasi untuk mempermudah warga memenuhi kebutuhan pokok. Untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti layanan kesehatan, kiranya cukup ada satu Puskesmas di kota kecamatan. Sedangkan untuk layanan pendidikan di Desa Bendo cukup satu SD. Untuk SLTP di kota kecamatan. Namun untuk SLTA perlu diperhatikan karena SLTA, adanya di luar wilayah kecamatan.

Sinergitas Sebagai Strategi Usulan Kebijakan

Penanganan dan pemberdayaan warga miskin menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten serta masyarakat melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial maupun masyarakat umum. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, mengamanatkan bahwa pemberdayaan komunitas dimaksud perlu ditangani oleh semua pihak. Kontribusi dari masing-masing pihak tentunya dalam kapasitas yang berbeda. Kementerian Sosial c.q. Direktorat PKAT Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan berperan melalui penetapan kebijakan pemberdayaan. Pemerintah Provinsi memberikan dukungan koordinasi, sarana dan prasarana. Pemerintah Kabupaten memberikan langsung terhadap komunitas yang diberdayakan, melalui usaha ekonomis produktif pasca pembinaan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada: 1) Bapak Dwi Heru Sukoco sebagai pimpinan Puslitbangkesos yang telah menugaskan kami ke Sragen dalam rangka monitoring Program Pelayanan Terpadu Menuju Kabupaten Sejahtera; 2) Bapak Suyadi dan jajarannya sebagai Ketua UPTPK Kabupaten Sragen yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti dalam mencari dan memberikan informasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di wilayah Kabupaten Sragen.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, I. G. (1992). *Metode Penelitian Sosial Pengertian dan Pemakaian Praktis 1*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Agus Fatchur Rahman, SH. MH (3 Desember 2014). *Konsep dan Aplikasi Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sragen*, Pemerintah Kabupaten Sragen.
- Bappenas, (2014). *RPJMP 2015-2019 Bahan Paparan di Kabupaten Sragen tgl 3 Desember 2014*.
- Budhisantoso. (2006). *Pemberdayaan Masyarakat Terasing*. Makalah disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya Nasional Pengkajian Sosial Budaya dan Lingkungan Komunitas Adat Terpencil (KAT), Departemen Sosial, Jakarta 14-18 November 2006.
- Departemen Sosial RI, (1990). *Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Menanggulangi Rawan Pangan dan Kemiskinan Sebagai Dampak Sosial Akibat Bencana dan Krisis Ekonomi*; Jakarta.
- Dubois, Brenda & Milley, KK. (2005). *Social Work An Empowering Profession*. Pearson Education, Inc.
- Kartasmita (1996). *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. PT Pustaka CIDESINDO, Jakarta.
- Maranell, G.M. (Ed.). (1974). *Scaling: A Sourcebook for Behavioral Scientists*. Chicago: Aldine Publising Company.
- Midgley, James. (2005). *Pembangunan Sosial Perspektif Pembangunan Dalam Kesejahteraan Sosia. Diperta Islam Departemen Agama RI, Jakarta*.
- Segal, E.E., and Stephanie, B. (1998). *Social Welfare Policy, Programs, and Practice*. Itaca, Illinois: F.E. Peacock Publishers, Inc.
- Shortel and Richardson. (1978). *The Evaluation Process, in 'Health Program Evaluation'*. St Louis: CV Mosby Company.
- Soetomo, (2011). *Pemberdayaan Masyarakat, Mungkinkah Muncul Antitesisnya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Soetomo, (2012). *Keswadayaan Masyarakat Manifestasi Kapasitas Masyarakat Untuk Berkembang Secara Mandiri*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Susetiawan (2009). *Kesejahteraan Masyarakat Yang Terpasung: Ketidak Beradayaan Para Pihak Melawan Kontruksi Neoliberalisme*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sugiyono. (2010). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. (editor).(2004). *Isu-isu tematik pembangunan sosial: Konsepsi dan strategi*. Jakarta: Balatbangsos Departemen Sosial RI.
- Suharto, Edi. (2007). *Kebijakan sosial sebagai kebijakan publik.*, Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. (2009). *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*. Bandung; Alfabeta.
- Sumodiningrat, G. (1997). *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat (Edisi kedua)*, Bina Rena Pariwara; Jakarta.

- Nasikun, (1990). Partisipasi Penduduk Miskin Dalam Pembangunan Pedesaan Suatu Tinjauan Kritis dalam Percikan Pemikiran Fisipol UGM Tentang Pembangunan, FISIPOL UGM; Yogyakarta.
- Nuryana, Mu'man., (2002), Peranan Sosial Capital Sebagai Piranti Sosial Komunitas Dilihat dari Dimensi Teoritis dan Empiris, dalam INFORMASI Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial, Pusat Penelitian Permasalahan Kesejahteraan Sosial, Jakarta, Vol. 7, No.2.
- Soleh, Chabib. (2014). Dialektika Pembangunan dengan Pemberdayaan. Jakarta: Fokusmedia
- Solekhan, Moch. (2012), Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Setara, Malang.
- Wuryandari, A. (2010). Partisiapasi Masyarakat Untuk Mengembangkan Program Sanitasi Berbasis Masyarakat Di Desa Sido Makmur Kecamatan Wai Panji Kabupaten Lampung Selatan, Tesis S2 Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Program Magister Ilmu Kesejahteraan, Universitas Indonesia, Jakarta.